

Ratusan Polisi Ditugaskan Jadi Polisi RW

SALATIGA (KR) - Sebanyak 210 anggota Polres Salatiga ditempatkan dan ditugaskan menjadi Polisi Rukun Warga (Polisi RW). Setiap RW di Salatiga terdapat satu polisi yang bertugas membantu petugas Bhabinkamtibmas. Kapolres Salatiga, AKBP Fera Kumaiwan kepada KR mengatakan jumlah kelurahan di Salatiga sebanyak 23 dan RW sebanyak 210. Karena Salatiga merupakan wilayah kota, sehingga bisa langsung dilakukan penugasan 100 persen dari jumlah RW di Salatiga, karena jumlah personil Polres Salatiga mencukupi. Kami tugaskan 210 anggota bertugas sebagai Polisi RW ditempatkan di 210 RW yang ada. Jumlah anggota Polres Salatiga sangat cukup untuk mengcover 210 RW ini sehingga langsung 100 persen kami lakukan," jelas AKBP Fera Kumaiwan, Kamis (11/5).

Salah satu tugas Polisi RW adalah melakukan koordinasi dan komunikasi langsung dengan pengurus RW bersama RT dalam memantau keamanan kejadian dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya Polisi RW ini juga selalu bergandeng tangan dengan petugas Bhabinkamtibmas yang jumlahnya hanya satu orang di tiap kelurahan. Polisi RW setiap satu RW satu orang dan ditempatkan polisi yang domisili di RW setempat. "Kalau di RW bersangkutan tidak ada polisi, maka akan dilakukan oleh jajaran Polsek setempat," katanya. **(Sus)-f**

Angkutan Muatan Berlebih Dikenai Tindakan Tegass

SUKOHARJO (KR) - Kendaraan dengan muatan berlebih menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan. Petugas gabungan akan melakukan penertiban dan penindakan tegas. Pengawasan nantinya juga akan mengandalkan kamera CCTV di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sukoharjo Toni Sri Buntoro, Kamis (11/5) mengatakan, Pemkab Sukoharjo pada dasarnya sudah menyediakan kebutuhan infrastruktur seperti jalan dan jembatan untuk masyarakat.

Pemenuhan dilakukan sebagai fasilitas umum dan kondisinya sangat layak. Namun demikian, dalam pemanfaatannya sering terjadi pelanggaran dilakukan oleh sejumlah oknum sehingga mempercepat masa usia pakai dan berdampak pada kerusakan. Bentuk pelanggaran yang sering ditemukan dan menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan yakni adanya kendaraan angkutan membawa muatan berlebih. Temuan diapati petugas seperti pada truk berukuran besar dan membawa barang sangat banyak. Selain itu ada juga truk mengangkut material tanah uruk, pasir dan batu.

Temuan pelanggaran kendaraan angkutan barang diapati Dishub Sukoharjo di sejumlah wilayah. Tidak hanya di pinggir saja, melainkan juga sampai ditengah kota. Para sopir sering kucing-kucingan dengan petugas saat akan melintas. "Sopir ini menunggu petugas lengah, atau pada saat wilayah tersebut tidak dijaga baru sopir nekat melintas. Padahal jalan yang dilewati tersebut sering bukan kelasnya dan membawa muatan berlebih," ujarnya.

Dishub Sukoharjo melakukan berbagai upaya pencegahan pelanggaran kendaraan angkut dengan muatan berlebih sebagai antisipasi kerusakan jalan. Salah satunya yang sudah dilakukan yakni dengan memasang rambu lalu lintas. Pemasangan dimaksudkan agar para sopir bisa mengetahui batasan beban muatan angkut dan kelas jalan.

Upaya lainnya juga dilakukan dengan menempatkan petugas jaga di sejumlah wilayah. Hal ini sebagai pemantauan sekaligus antisipasi munculnya pelanggaran di lapangan. Namun demikian, karena keterbatasan jumlah personil dan luasnya wilayah maka pemantauan dilakukan hanya dititik tertentu saja. Dishub Sukoharjo juga melibatkan petugas gabungan dari instansi terkait salah satunya Satlantas Polres Sukoharjo. Hal ini dilakukan karena mereka punya peran penting dalam penindakan pelaku pelanggaran. **(Mam)-f**

Perubahan Sambungan hal 1

agar negaranya terus maju. Kemajuan diartikan sebagai peningkatan pada segala aspek kehidupan. Basis peningkatan adalah perubahan. Itulah, maka bangsa Amerika wajib mendesain diri sebagai agen perubahan dunia. Semakin sering berubah, kehidupan semakin mendekati kesempurnaan.

Filsuf Albert Einstein menyatakan bahwa hakikat hidup adalah gerak. Tidak ada kehidupan kecuali sesuatu terus bergerak/berubah. Manusia diberi akal dan tenaga, untuk modal pergerakan. Pergerakan senantiasa berlangsung dalam relativitas. Kadar kualitas dan kuantitasnya, sesuai kecerdasan akal dan tenaga yang tersedia.

Orang-orang China memiliki filsafat kehidupan seolah angin bertiup. Ketika angin bertiup kencang, ada orang membetengi diri dengan tembok. Akan tetapi, ada pula orang justru membangun kincir angin. Pilihan, ada pada masing-masing.

Perubahan merupakan keniscayaan hidup. Sejak dulu menjadi perhatian orang-orang terkemuka. Perubahan fisik sampai dengan mental-spiritual. Misal: perubahan dari anak, remaja, dewasa, hingga tua-renta. Seiring dengan itu, ada perubahan gaya hidup, kesehatan, finansial, hingga wawasan kehidupan menyeluruh. Sudut pandang dan wawasan masa depan, menjadi faktor-faktor penentu dalam memaknai perubahan.

Dalam filsafat proses, awal kehidupan di dunia adalah tangisan. Pertengahannya adalah ujian. Ujungnya adalah kefanaan. Bayi terlahir sehat, pastilah diawali tangisan. Bayi menangis, karena kaget dan takut menghadapi panas dan ganasnya kehidupan. Ketika jiwa dan raga tumbuh dewasa, berbagai ujian dihadapinya. Ujian, seolah musim hujan. Karena siraman air, tanaman-tanaman tumbuh. Berbuah lebat. Tetapi, suatu saat, air mendinger. Tanaman hijau menjadi kuning. Mati. Hancur.

Manusia bijak, muncul dari pembelajaran kegagalan dan kesuksesan. Manusia cerdas, sadar bahwa kehidupan di dunia hanyalah kesenangan yang menipu (fatamorgana). Banyak-beragam asesoris dan hiasan. Wujudnya: gelar, jabatan, harta-benda, popularitas, dan lain-lain. Segalanya indah, menakjubkan. Akan tetapi, tak berguna sebagai bekal pertanggungjawaban kepada ilahi, kecuali terkategori sebagai barang haram. Diperoleh melalui amal saleh. Sebaliknya, barang haram, amal salah (buruk dan sesat) ditolak Allah swt.

Perubahan macam apa yang perlu ada dalam kehidupan ini? Total ataukah sekadar partial? Jawabannya, terpolung pada ajaran suci. Sesungguhnya, jati diri (fitrah) manusia itu makhluk bertuhan. Bukankah Aku ini tuhanmu? Benar, saya bersumpah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau (Allah swt). Tiada manusia dicipta kecuali untuk beribadah kepadaNya.

Pada ranah fitrah ini, posisi dan kewajiban, tidak dimungkinkan berubah. Sampai kapanpun, manusia adalah abidillah. Segala perlakunya harus bernilai ibadah. Menjadi penyelenggara negara ataukah warga negara, betapapun tugas dan tanggungjawabnya berbeda-beda, tetapi orientasinya mesti sama, tak berubah, yakni pengabdian, demi keridhaan Allah swt.

Seiring perkembangan ilmu dan teknologi, pastilah ada perubahan perhal cara, metode, prosedur pengabdian horizontal. Berdemokrasi, misalnya. Akankah langsung atau tidak langsung? Pemilu, mau pakai sistem terbuka ataukah sistem tertutup? Pilihan terbaik disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Tidaklah dibenarkan, desain demokrasi dan pemilu, berwatak elit-manipulatif. Rakyat sebagai subjek, perlu di-uwongke, jangan dibohongi. Kebijakan partisipatif dan populis amat dibutuhkan, agar perubahan kehidupan bermasyarakat mendapatkan legitimasi publik. Salam Pancasila, sehat, bahagia.

(Penulis adalah Guru Besar UGM Pengampu Filsafat Ilmu Hukum)-d

ZERO HP, PUNGLI DAN NARKOBA DIDEKLARASIKAN

Dilakukan Razia Gabungan di Lapas Magelang

MAGELANG (KR) - Zero Hand-phone (HP), Pungli dan Narkoba (Halinar) di deklarasikan di LP Kelas IIA Magelang (Lapas Magelang), Rabu (10/5). Penandatanganan lembar deklarasi juga dilakukan di forum upacara yang dipimpin Plt Kepala Lapas Magelang Kusbiyantoro BclP SH MH ini. Kepala BNN Kabupaten Magelang Dr Bogie Setia Perwira Nusa SH SHI MH MSi MAP, perwakilan dari Polsek Magelang Tengah dan perwakilan Koramil Magelang Tengah ikut menyaksikan deklarasi ini.

Kepada KR usai acara, Plt Kepala Lapas Magelang mengatakan di Lapas Magelang tidak ada kamar mewah. Kondisi kamar-kamarnya sama semua seperti kamar tahanan biasanya. Selain itu juga tidak terjadi transaksi narkoba maupun pengendaliannya. Semua karyawan atau pegawai Lapas Magelang, Rabu, mendeklarasikan masalah zero tersebut. Ini juga dibuktikan dengan hasil penggeledahan atau razia oleh tim gabungan dari Lapas Magelang, TNI dan Polri serta BNN Kabupaten Magelang yang dilaksanakan Selasa (9/5) lalu.

Kepala Lapas Magelang di forum upacara tersebut juga memimpin pembacaan deklarasi, bahwa mereka bertekad bulat mewujudkan

Lapas Magelang zero dari HP, Pungli dan Narkoba (Halinar), menolak segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan HP, pungli dan narkoba.

Juga mendukung penegak hukum terhadap segala bentuk tindak pidana kejahatan narkoba, siap berkoordinasi dan berkolaborasi dengan instansi dan pihak manapun dalam melaksanakan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Kusbiyantoro juga menegaskan adanya sanksi sangat berat bagi karyawan yang melakukan pelanggaran atau tugasnya terlibat dalam memberikan fasilitas atau membawakan maupun lainnya, diyakini pimpinan mengambil langkah cukup tegas. "Sampai mungkin bisa pemberhentian dengan tidak hormat," katanya.

Sementara itu kegiatan penggeledahan dan razia tim gabungan dari Lapas Magelang, TNI, Polri dan BNN Kabupaten Magelang dilakukan, Selasa (9/5) lalu. Beberapa alat pencukur kumis, korek api maupun lainnya berhasil diamankan. Dalam rangkaian kegiatan ini juga dilaksanakan tes urine terhadap beberapa orang perwakilan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Magelang.

Dalam kegiatan ini tim gabungan dibagi dalam beberapa kelompok, yang melakukan pemeriksaan di Blok berbeda. WBP yang sebelumnya berada di dalam kamar-kamar, terlebih dahulu secara bergantian diminta untuk keluar kamar. Beberapa petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan. Petugas gabungan juga melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam setiap kamar.

Kegiatan ini juga berhasil mengamankan alat pencukur kumis, korek api, sendok, beberapa paku maupun lainnya. Barang-barang ini dianggap sebagai barang yang dapat disalahgunakan. Didampingi perwakilan dari TNI, Polri dan BNN Kabupaten Magelang, juga dikatakan Kusbiyantoro dalam kegiatan gabungan tersebut juga diamankan lampu *teplok* atau lampu *sentir* yang terbuat bekas tempat pomade rambut. **(Tha)-f**



Salah satu karyawan Lapas Magelang saat membubuhkan tanda tangannya pada lembar deklarasi.

Perusahaan Didesak Selesaikan Pembayaran THR

SUKOHARJO (KR) - Pemkab Sukoharjo mendesak kepada pihak perusahaan yang belum melunasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2023 untuk segera memenuhi kewajibannya.

Sebab THR menjadi hak buruh dan sudah ada aturannya. Namun demikian, sistem pembayaran dilakukan secara dicicil dilakukan perusahaan karena sudah ada kesepakatan dengan buruh.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Widodo, Kamis (11/5) mengatakan, Pemkab Sukoharjo sudah mendapat keluhan dari serikat pekerja terkait kondisi dimana ada sejumlah perusahaan belum melunasi pembayaran 100 persen THR Idul Fitri 2023 kepada ribuan buruh. Atas kondisi tersebut Pemkab Sukoharjo melalui Organisasi Peringkat Daerah (OPD) terkait sudah turun dan mendesak kepada pihak perusahaan untuk segera melakukan pelunasan 100 persen pembayaran THR Idul Fitri 2023 sece-

patnya. Permintaan pelunasan dilakukan mengingat perusahaan memiliki kewajiban membayar THR Idul Fitri. Disisi lain, THR merupakan hak buruh yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Dalam pembayarannya sendiri dijelaskan Widodo sejak awal pemerintah sudah meminta kepada pihak perusahaan melakukan pembayaran langsung 100 persen dan tidak boleh dicicil. Dalam pelaksanaannya ternyata masih ada temuan perusahaan membayar THR Idul Fitri dengan cara dicicil. Kondisi tersebut membuat buruh tidak bisa langsung menerima THR Idul Fitri secara utuh 100 persen dalam satu waktu.

"Pemkab Sukoharjo mendesak kepada pihak perusahaan yang

belum melunasi pembayaran THR Idul Fitri 2023 untuk segera memenuhi kewajibannya," ujarnya. Widodo menjelaskan, berdasarkan laporan yang masuk ternyata ada beberapa kendala terjadi di lapangan. Salah satunya terkait adanya kesepakatan antara pihak perusahaan dan buruh dimana pembayaran THR Idul Fitri 2023 bisa dilakukan pembayaran dengan sistem dicicil.

"Informasinya sudah ada kesepakatan agar pihak perusahaan bisa mencicil pembayaran THR dan buruh dalam posisi lemah karena khawatir terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)," lanjutnya. Pemkab Sukoharjo kedepan meminta agar buruh berani menolak kesepakatan pembayaran THR Idul Fitri dengan cara dicicil. Sebab pemerintah secara tegas sudah melarang sistem dicicil dan wajib dibayar lunas 100 persen.

Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo sekaligus Ketua

Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo, Sukarno, mengatakan, FPB Sukoharjo per 2 Mei 2023 masih menemukan ribuan buruh belum menerima pelunasan 100 persen pembayaran THR Idul Fitri 2023 di tiga perusahaan. Temuan diapati FPB Sukoharjo setelah melakukan pemantauan langsung sekaligus mendapat laporan aduan dari buruh.

FPB Sukoharjo menemukan di tiga perusahaan tersebut memiliki banyak buruh. Dalam temuannya pihak perusahaan dan buruh sebelumnya telah melakukan kesepakatan terkait pembayaran THR Idul Fitri 2023 dilakukan dengan sistem dicicil. Kesepakatan tersebut membuat pihak perusahaan memiliki kekecewaan dalam proses pembayaran THR Idul Fitri 2023 kepada ribuan buruh. Sebab pihak perusahaan tidak harus melakukan langsung pelunasan 100 persen pembayaran THR Idul Fitri 2023 kepada buruh. **(Mam)-f**

KPK Soroti Korupsi Sejumlah Kades

KARANGANYAR (KR) - Kepala desa berperan penting dalam menyelamatkan anggaran negara dari aksi pencurian. Begitu pula sebaliknya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki 851 kasus korupsi terjadi di desa sepanjang 2015-2022. Dari jumlah tersebut, 50 persen pelaku korupsinya kepala desa.

Hal itu diungkapkan Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aris Dedi Arham saat memberikan pembinaan kepada kepala desa se-Kabupaten Karanganyar di aula DPUPR Kabupaten Karanganyar, Jateng, Rabu (10/5).

Modus yang dipakai pelaku korupsi di desa seperti markup anggaran, pemalsuan tandatangan atau stempel, manipulasi belanja kegiatan dan sebagainya. Sasaran korupsi kebanyakan Dana Desa. Kades selaku pihak paling berwenang mengelolanya, sering memanfaatkan itu untuk memperkaya diri.

"Pemerintah memberikan aturan jelas pemakaian Dana Desa. Penggunaan dana wajib mengikuti aturan itu. Kalau menyimpang, bisa dijerat pidana. Apalagi korupsi dana desa," katanya. Angka kasus korupsi desa selama tujuh tahun terakhir cukup tinggi. Data yang diperoleh dari Bareskrim

Polri, korupsi desa sepanjang itu ada 851 kasus dengan 973 pelaku. Dimana 50 persen pelaku korupsi desa adalah kepala desa. Lalu lainnya perangkat desa seperti bendahara.

Dia pun mengingatkan pentingnya kepala desa melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal ini sebagai bentuk transparansi pejabat publik.

"LHKPN menjadi penting karena bentuk pengawasan masyarakat ke pejabat publik. Dari setiap laporan akan terlihat kenaikan kekayaan," katanya.

Saat ini, mulai muncul pejabat

penyelenggara negara yang memiliki harta kekayaan tidak wajar. Mereka memamerkan gaya hidup mewah di media sosial sehingga memicu komentar warganet. Hingga akhirnya, menggiring kecurigaan KPK terhadap para pejabat itu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar Timotius Suryadi mengatakan ada 55 kepala desa yang belum melaporkan LHKPN. Beberapa di antaranya masih terkendala masalah teknis. Pihaknya kembali mengingatkan kepala desa untuk segera melaporkan LHKPN. "Paling lambat Mei ini segera diserahkan LHKPN," ujarnya. **(Lim)-f**

Bupati Klaten Buka TMMD Sengkuyung Tahap I

KLATEN (KR) - Bupati Klaten Sri Mulyani membuka TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I Tahun 2023, di Desa Kahuman, Kecamatan Ngawen, Klaten, Rabu (10/5). Upacara pembukaan bertempat di Lapangan Desa Senden, Ngawen. Uasi upacara, Bupati Klaten, Sri Mulyani mengemukakan, sangat mengapresiasi kegiatan TMMD Tahap I di Desa Kahuman. Bupati berharap, dengan TMMD ini, pembangunan yang belum terselesaikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa, segera terselesaikan.

"Saya berharap Pemerintah Desa dan masyarakat bisa bergotong royong untuk menyelesaikan program-program yang telah

ditargetkan," kata Sri Mulyani. Komandan Kodim (Dandim) 0723 Klaten, Letkol Czi Bambang Setyo Triwibowo, mengatakan TMMD untuk mempercepat pembangunan daerah dengan sasaran pokok peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sri Mulyani mengajak semua pihak untuk mendukung TMMD di Desa Kahuman yang dimulai Rabu (10/5) hingga 08 Juni 2023.

Perwira Pelaksana, Budiyono melaporkan bahwa latar belakang terpilihnya sasaran TMMD Desa Kahuman karena terbatasnya akses jalan antar desa sehingga menghambat akses pertanian dan perekonomian. Sasaran pokok betonisasi jalan panjang 674 meter, lebar tiga meter, tebal 15 centime-

ter, pembangunan talud panjang 250 meter, lebar 30 centimeter, dan tinggi satu meter. Sasaran non fisik, teridir pelayanan posyandu, penyuluhan stunting, penyuluhan posbindu, pelayanan KB Kesehatan, penyuluhan narkoba dan penghijauan.

Ia menambahkan, tenaga kerja yang melaksanakan pengerjaan setiap hari yakni TNI 40 orang, Polri sejumlah lima orang, teknisi dua orang, aparat desa sejumlah lima orang, masyarakat sejumlah 40 orang. Acara pembukaan ditandai dengan penandatanganan prasasti berita acara oleh Bupati Klaten dan Komandan Kodim 0723 Klaten. Selanjutnya, Bupati melakukan pemukulan gongg didampingi Forkopimda sebagai tanda TMMD Sengkuyung

tahap I di Desa Kahuman resmi dibuka. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Klaten juga memberikan bantuan berupa tiga bantuan perbaikan rumah rusak (BPRR), jambanisasi untuk tiga orang, bantuan kepada Marbot sejumlah lima orang, dan bantuan lain. Total keseluruhan bantuan dari BAZNAS sejumlah Rp. 31.500.000. Upacara dihadiri Forkopimda, Korem 074/Warastatama, Kepala OPD, Pajurit Polres Klaten, Pajurit TNI, Satpol PP, Dishub, Anggota Persit, Pengurus TP PKK Klaten, Pengurus DWP Klaten, Linmas, dan Siswa SMK N 2 Klaten. **(Sit)-f**



Bupati Klaten bersama Forkopimda saat membuka TMMD.